

BAB 1

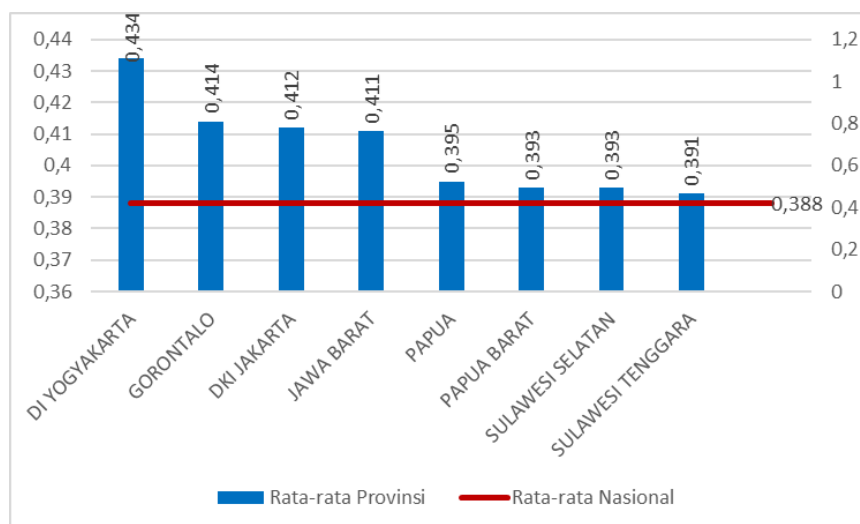
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan rancangan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan utama dari pembangunan ekonomi tersebut adalah kesejahteraan ekonomi. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut sering menjadi masalah dimana pemerintah lebih fokus dalam upaya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak memperhatikan perihal ketimpangan pendapatan. Meskipun pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan secara nasional terus diupayakan, ketimpangan pendapatan tetap menjadi salah satu permasalahan struktural yang persisten di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang tercermin dari ketimpangan pendapatan antargolongan masyarakat maupun antardaerah yang ditunjukkan oleh nilai rasio gini (Nurain & Juliannisa, 2022).

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Walaupun perekonomian terus tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, pemerataan hasil pembangunan belum tercapai sehingga distribusi pendapatan tetap timpang. Hal ini tercermin dari nilai rasio gini yang menunjukkan bahwa porsi kekayaan nasional lebih banyak dinikmati kelompok tertentu, sedangkan sebagian besar penduduk lainnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dimana situasi tersebut bukan hanya memunculkan rasa ketidakadilan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas sosial (Maylia Farhan Hariadi et

al., 2025). Data mengenai perbandingan ketimpangan pendapatan di provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Berbagai Tahun

Gambar 1. 1
Rata-rata Rasio Gini Pada 8 Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2024

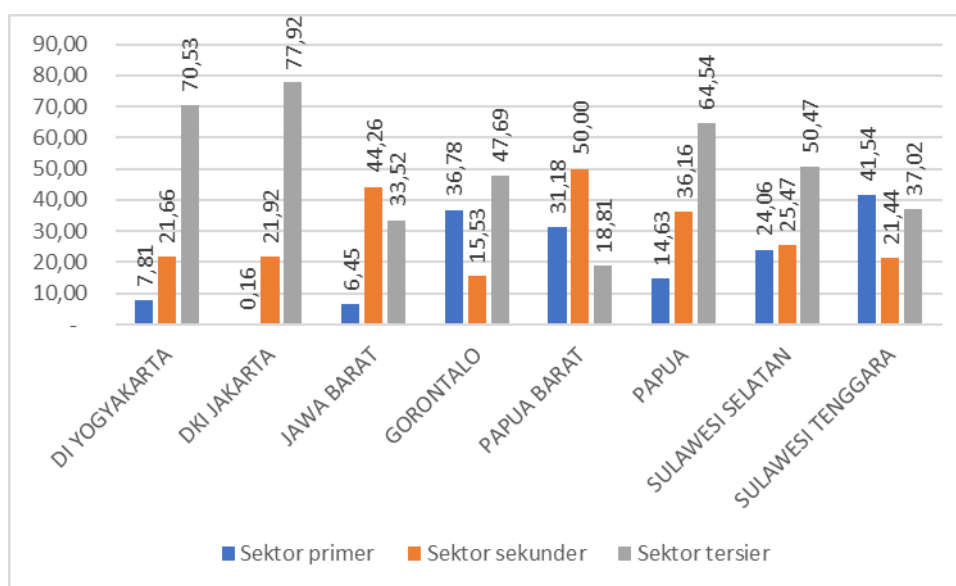
Dapat dilihat dalam gambar 1.1 yang menampilkan data statistik bersumber dari publikasi BPS mengenai perbandingan rata-rata rasio gini pada delapan provinsi dengan rata-rata nasional dan ditemukan indikasi dimana delapan provinsi tersebut memiliki rasio gini di atas rata-rata nasional. Pada grafik tersebut, DI Yogyakarta, Gorontalo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan rasio gini kategori sedang berada di angka 0,4 dimana provinsi-provinsi tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional tetapi sekaligus menjadi provinsi-provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia sedangkan Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan rasio gini kategori rendah mendekati sedang berada di angka 0,39. Pada dasarnya, delapan provinsi tersebut sama-sama menghadapi permasalahan distribusi pendapatan yang belum merata.

Jika situasi ini tidak ditangani secara efektif akan terus meningkatkan rasio gini pada provinsi-provinsi tersebut dan berdampak pada peningkatan rasio gini nasional sehingga menghambat tujuan ekonomi yang berkeadilan dan merugikan prospek ekonomi jangka panjang akibat partisipasi ekonomi kelompok bawah yang rendah serta meningkatnya ketidakstabilan ekonomi dan sosial sehingga menambah jumlah penduduk miskin.

Teori Kuznetz S (1955) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi pada tahap awal akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, setelah perubahan struktur ekonomi berjalan dengan sempurna dan diiringi dengan proses pembangunan, maka tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan menurun yang digambarkan dengan kurva hipotesis kuznet dengan bentuk U terbalik. Teori ini memberi gambaran makro bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian disertai tahap pembangunan melalui kebijakan pemerintah yaitu penetapan upah minimum dan aturan wajib belajar 13 tahun dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional revisi dari UU No. 20 Tahun 2003 yang dilihat dari rata-rata lama sekolah. Menurut Hermawan & Taher (2025), Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal kurva kuznet dimana perubahan struktur ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Pertama, faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah struktur perekonomian. Menurut Chenery & Syrquin (1975), menyatakan bahwa struktur perekonomian terdiri dari susunan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah yang secara umum dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier. Data PDRB yang

bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sejak beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran struktur perekonomian dari dominasi sektor primer menuju sektor non primer, khususnya industri pengolahan dan jasa. Perubahan kontribusi sektor ini di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan ketika manfaat pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor-sektor modern tersebut tidak dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat dan wilayah. Data mengenai kontribusi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 (diolah)

Gambar 1. 2
Kontribusi sektoral pada 8 Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2024 (Persen)

Sektor primer di Indonesia yang mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian memiliki posisi penting dalam struktur perekonomian nasional, terutama sebagai fondasi ekonomi masyarakat pedesaan.

Menurut Hermawan & Taher (2025), Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal kurva kuznet dimana perubahan struktur ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara kontribusi sektor primer dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan pada Provinsi Gorontalo dengan kontribusi sektor primer yang tinggi sebesar 36,78 persen disertai dengan rasio gini sebesar 0,414 sedangkan Papua dengan kontribusi sektor primer yang lebih rendah sebesar 14,63 dengan rasio gini sebesar 0,395 lebih rendah dari Gorontalo. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Dewa & Utomo (2025) menyatakan bahwa sektor primer berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Herlina et al. (2022) menyatakan bahwa sektor primer berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena ketika bekerja di sektor primer walaupun dengan pendapatan kecil mampu pemeratakan pendapatan jika dibandingkan apabila mereka menganggur dan tidak memperoleh pendapatan.

Sektor sekunder yang meliputi industri manufaktur, pengolahan, konstruksi, listrik, gas, dan air yang memiliki peran penting dalam proses transformasi ekonomi negara berkembang. Menurut Hermawan & Taher (2025), Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal kurva kuznet dimana perubahan struktur ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara sektor sekunder dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan pada Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sektor sekunder yang tinggi sebesar 44,26 persen disertai dengan rasio gini sebesar 0,411 sedangkan Sulawesi Tenggara dengan kontribusi sektor sekunder yang lebih rendah sebesar 21,44 dengan rasio

gini sebesar 0,391 lebih rendah dari Jawa Barat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Herlina et al. (2022) menyatakan bahwa sektor sekunder berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan Amalia & Utomo (2024) menyatakan bahwa sektor sekunder berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena adanya proses redistribusi sumber daya ekonomi dari sektor pertanian yang cenderung kurang produktif ke sektor industri yang lebih produktif, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

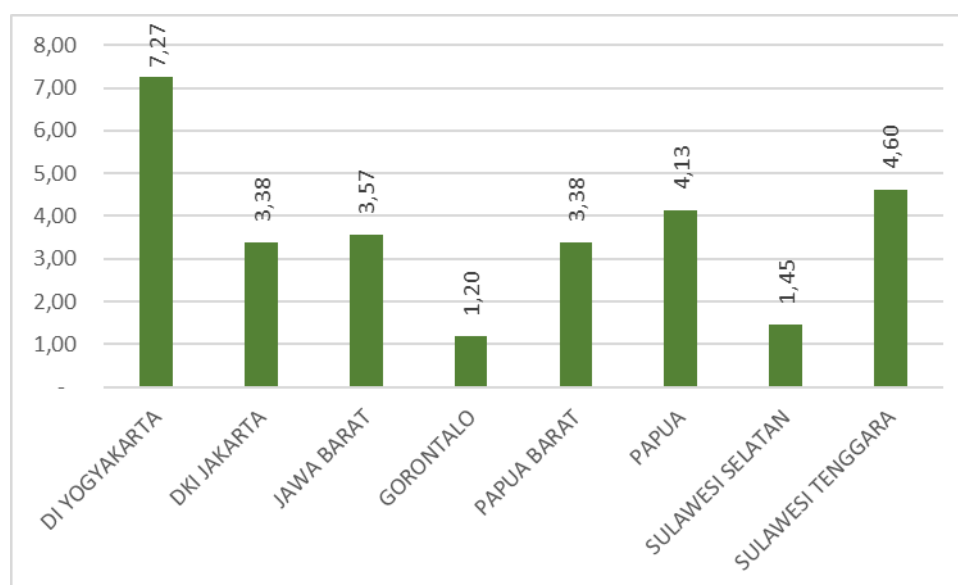
Sektor tersier, mencakup jasa perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, saat ini menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB di daerah urban dan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Hermawan & Taher (2025), Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal kurva kuznet dimana perubahan struktur ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara kontribusi sektor tersier dengan ketimpangan pendapatan. Herlina et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa kontribusi sektor tersier terutama pertumbuhannya sangat terpusat di perkotaan dan kurang mampu menyerap surplus tenaga kerja dari sektor primer dan sekunder secara optimal sehingga berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan pada Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sektor tersier yang tinggi sebesar 77,92 persen disertai dengan rasio gini sebesar 0,412 sedangkan Papua Barat dengan kontribusi sektor tersier yang lebih rendah sebesar 18,81 dengan rasio gini sebesar 0,393 lebih rendah dari DKI Jakarta. Hal ini didukung oleh penelitian Jabani et al. (2024) yang menyatakan

bahwa sektor tersier berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan penelitian oleh Amalia & Utomo (2024) menyatakan bahwa sektor tersier tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kemungkinan penyebabnya adalah karena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang saat ini memiliki dampak yang signifikan dan tidak dapat diabaikan terutama dalam meningkatkan produktivitas sumber daya di sektor perekonomian, khususnya dalam penyediaan jasa di sektor jasa.

Delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia menunjukkan karakter struktur perekonomian yang beragam. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua dan Sulawesi Selatan ditandai oleh dominasi sektor tersier sedangkan Jawa Barat dan Papua Barat memiliki basis sektor sekunder. Sementara itu, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara masih relatif bertumpu pada sektor-sektor primer seperti pertanian, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya dengan perkembangan sektor industri dan jasa yang belum merata di seluruh wilayahnya. Perbedaan komposisi sektor ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian berpotensi menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan antardaerah. Melihat situasi ini, pemerintah juga berupaya untuk menekan rasio gini melalui berbagai kebijakan salah satunya melalui kebijakan upah dan pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah.

Selanjutnya, faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah upah minimum yang dinilai memberikan kontribusi terhadap perbedaan perekonomian, terutama antar daerah perkotaan dan pedesaan. Peningkatan upah minimum di setiap provinsi dianggap sebagai langkah strategis dalam mengurangi

disparitas pendapatan (Julihanza & Khoirudin, 2023). Menurut Levitan & Belous (dalam Oktasari & Suradi, 2025) yang menyebutkan bahwasannya upah minimum berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan pelindung pekerja berupah rendah. Dengan demikian, upah minimum tidak hanya menjadi pelindung bagi pekerja berpenghasilan rendah, tetapi juga berperan penting dalam membantu menciptakan keadilan ekonomi. Data mengenai pertumbuhan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 (diolah)

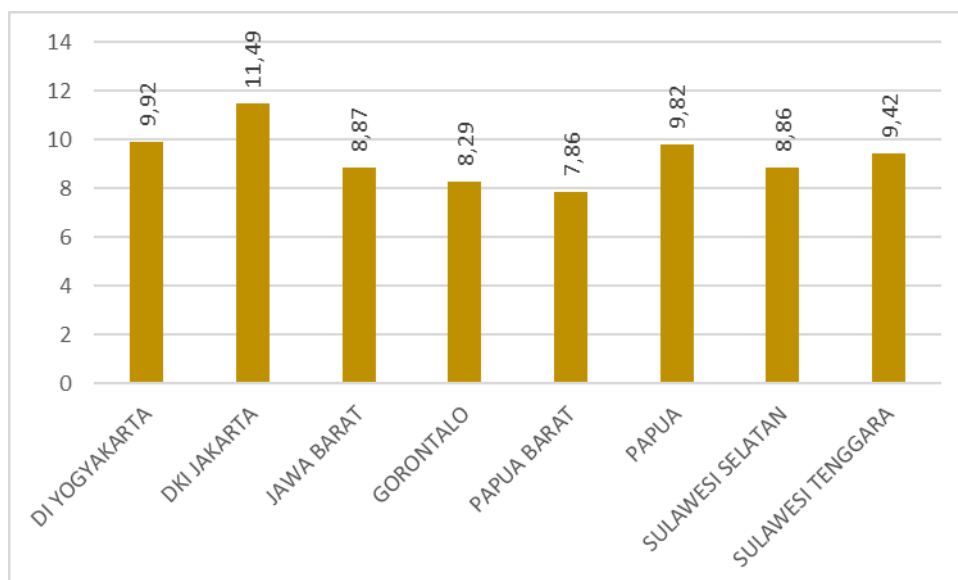
Gambar 1. 3

Kenaikan Upah Minimum pada 8 Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2024 (Persen)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan kenaikan upah minimum yang cukup tinggi sebesar 4,60 persen diiringi dengan rasio gini sebesar 0,391 sedangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan kenaikan upah lebih rendah dari Sulawesi Tenggara sebesar 1,20 persen diiringi dengan rasio gini yang lebih tinggi dari Sulawesi Tenggara sebesar 0,414. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Oktasari & Suradi (2025) menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan penelitian oleh Astary et al. (2024) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena dengan UMP yang mana adanya tenaga kerja yang tidak menerima upah sesuai dengan UMP atau merupakan pekerja informal.

Selanjutnya, faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah rata-rata lama sekolah yang telah dijalani mulai dari sekolah dasar hingga akhir dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuat seseorang lebih mudah guna memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatannya. Pendapatan yang lebih tinggi dapat membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Oktasari & Suradi, 2025). Data mengenai rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

Gambar 1. 4

Rata-rata lama sekolah pada 8 Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2024 (Tahun)

Teori *human capital* oleh Becker & Chiswick (1966) menyebutkan bahwa peran modal manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan. Artinya, tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan pada Provinsi Papua Barat dengan rata-rata lama sekolah 7,86 tahun disertai dengan rasio gini sebesar 0,411 sedangkan Sulawesi Tenggara dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi sebesar 9,42 tahun dengan rasio gini yang lebih rendah dari Papua Barat sebesar 0,391. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Sari et al., (2021) menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. sedangkan penelitian Sugiarti & Erdkhadifa, (2023) menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena kualitas pendidikan di setiap daerah belum merata sehingga biaya pendidikan yang dikeluarkan belum sesuai dengan kualitas yang semestinya sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Penulis melihat terdapat *gap* atau kesenjangan dari uraian latar belakang di atas sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam. Hal yang menjadi daya tarik penulis dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dan penulis melihat karakteristiknya melalui struktur ekonomi yang terdiri dari kontribusi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Selain itu, belum banyaknya yang meneliti terkait pengaruh struktur ekonomi terhadap ketimpangan

pendapatan, penulis juga ingin mengetahui lebih dalam seberapa kuat kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda menggunakan upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus Pada 8 Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kontribusi sektor primer, kontribusi sektor sekunder, kontribusi sektor tersier, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan pada delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi sektor primer, kontribusi sektor sekunder, kontribusi sektor tersier, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan pada delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor primer, kontribusi sektor sekunder, kontribusi sektor tersier, upah minimum provinsi, dan rata-rata

lama sekolah secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan pada delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2015-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor primer, kontribusi sektor sekunder, kontribusi sektor tersier, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan pada delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2015-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Masih sedikitnya penelitian terkait perubahan struktur ekonomi yaitu kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap ketimpangan pendapatan. penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan pada delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2015-2024. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan memperkaya literatur yang ada.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Menjadi dasar pembentukan rekomendasi kebijakan publik yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan rasio gini antarprovinsi, sehingga pemerintah dapat merancang intervensi

berbasis data yang efektif guna menurunkan ketimpangan secara terukur dan menysasar akar masalah. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan mengurangi ketimpangan (*goal* 10) dan mempromosikan kesejahteraan merata. Pemantauan rasio gini pada level provinsi tidak hanya menjadi indikator capaian pembangunan yang inklusif, tetapi juga alat evaluasi tata kelola keuangan daerah, distribusi infrastruktur, dan pemerataan layanan dasar lain.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk meningkatkan berpikir ilmiah, mengembangkan keterampilan analitis dalam memecahkan masalah di lapangan, serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari secara langsung dalam situasi nyata. Melalui proses studi ini, peneliti juga mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan, memperdalam wawasan akademis, serta memperkaya pengalaman yang berguna untuk penyusunan penelitian selanjutnya agar lebih komprehensif dan inovatif.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di delapan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Papua Barat, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk pengambilan data melalui sumber dengan mengakses dari

